

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu kesehatan global merupakan salah satu aspek penting yang yang tidak dapat dikesampingkan karena hubungannya yang erat dengan kehidupan manusia. Kajian kesehatan global mencakup berbagai permasalahan kesehatan di seluruh dunia yang membutuhkan kerjasama antar negara. Pendekatannya mencakup berbagai disiplin ilmu dan sektor, dengan tujuan utama menciptakan keadilan bagi setiap negara dalam hal akses terhadap layanan kesehatan (Audwina, 2023). Kajian kesehatan global timbul sebagai hasil dari perkembangan globalisasi yang semakin pesat, yang membuat berbagai masalah menjadi lebih signifikan, termasuk permintaan akan kepemimpinan global yang semakin meningkat. Tujuan kajian kesehatan global adalah untuk meningkatkan kesejahteraan semua individu di seluruh dunia dengan mengedepankan promosi kesehatan dan upaya pencegahan terhadap penyakit, kecacatan, dan kematian yang dapat dihindari. Untuk mencapai tujuan tersebut maka terdapat prioritas solusi masalah isu kesehatan global yaitu nutrisi atau gizi (Sulistyawati, 2021, 2-5). Gizi atau nutrisi merupakan komponen yang krusial dalam sektor kesehatan dan pembangunan suatu bangsa. Kualitas nutrisi yang baik memiliki kaitan langsung dengan kesehatan bayi, ibu, dan anak. Tingkat kekebalan tubuh yang optimal akan berdampak pada keamanan kehamilan

dan persalinan, serta menurunkan risiko penyakit tidak menular dan meningkatkan angka harapan hidup.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) status gizi merupakan kondisi kesehatan yang timbul dari keseimbangan antara kebutuhan nutrisi dan asupan nutrisi sehingga menjadi tolak ukur dalam penilaian perkembangan dan kebutuhan nutrisi anak. WHO sendiri menyediakan standar gizi baik yang disebut dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah standar kebutuhan zat gizi untuk setiap orang berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis (seperti hamil, menyusui, dan sakit) untuk hidup sehat. AKG digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyusunan, dan penilaian program gizi. Standar gizi ini dikembangkan berdasarkan konsensus antara berbagai peranan antara komite nasional gizi dan WHO yang menjelaskan mengenai jumlah makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi individu. Pematokan angka kecukupan gizi yang baik harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing individu dan standar wilayah individu tersebut.

Menurut laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World* terbaru oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) tahun 2021, Indonesia tercatat memiliki jumlah penduduk kurang gizi yang tinggi di Asia Tenggara yaitu Indonesia menempati peringkat ketiga dari sepuluh negara pada tahun 2021 (Ahdiat, 2022). Meskipun harapan untuk pemulihan dari pandemi Covid-19 dan perbaikan ketahanan pangan, laporan FAO menunjukkan bahwa kelaparan global terus meningkat hingga tahun 2021. Hal ini menyoroti bahwa kebijakan negara-

negara belum efektif dalam mengatasi masalah kelaparan, kerawanan pangan, dan masalah gizi (Ahdiat, 2022). Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan beban anak stunting atau gizi buruk tertinggi ke-2 di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia. Prevalensi stunting balita (persentase anak balita yang memiliki tinggi badan di bawah standar untuk usianya) Indonesia tertinggi ke-2 di Asia Tenggara, mencapai 31,8% pada 2020 (Mutia, 2021). Negara ini juga merupakan negara dengan jutaan anak-anak dan remaja yang tetap terancam dengan tingginya angka anak yang bertubuh pendek (*stunting*) dan kurus (*wasting*) serta '*beban ganda*' malnutrisi (Unicef Indonesia, 2014).

Salah satu provinsi yang difokuskan dalam upaya penurunan stunting karena memiliki jumlah balita stunting tinggi di Indonesia adalah Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat menjadi fokus utama kerjasama dengan *Nutrition International* (NI) karena tingginya prevalensi stunting yang tercatat pada tahun 2013 (sebelum dilakukannya kerjasama), yaitu sebesar 35,1%, yang menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga balita di provinsi ini mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Banten (33%) dan Jawa Timur (32,7%) (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Selain itu, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 43 juta jiwa pada tahun 2010 (BPS Jawa Barat, 2010). Dengan populasi yang besar, Jawa Barat juga memiliki jumlah balita yang lebih banyak, sehingga masalah stunting di provinsi ini berdampak luas pada kesehatan masyarakat. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk Banten pada tahun 2010 tercatat sebanyak 10,6 juta jiwa (BPS Banten, 2010), dan Jawa Timur

memiliki jumlah penduduk sekitar 37,5 juta jiwa pada tahun yang sama (BPS Jawa Timur, 2010). Meskipun prevalensi stunting di Banten dan Jawa Timur juga dapat dikatakan tinggi, akan tetapi Jawa Barat menghadirkan potensi dampak yang lebih besar jika berhasil mengatasi masalah gizi, berkat jumlah penduduknya yang lebih besar serta kebutuhan intervensi yang lebih mendesak.

Komparasi ini dilakukan dengan Provinsi Banten dan Jawa Timur karena kerjasama yang dilakukan oleh *Nutrition International* di Pulau Jawa hanya terbatas pada tiga provinsi tersebut, yakni Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Alasan pemilihan Pulau Jawa adalah karena pulau ini merupakan yang paling maju di Indonesia, dengan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih berkembang dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 60% tenaga medis bekerja di Pulau Jawa, dan hampir 50% rumah sakit berada di pulau ini (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Selain itu, angka harapan hidup di Jawa pada 2010 tercatat tertinggi di Indonesia, mencapai 71 tahun (BPS, 2010). Namun, sangat disayangkan bahwa meskipun sudah memiliki akses layanan kesehatan yang lebih baik, prevalensi malnutrisi, terutama stunting, masih cukup tinggi. Oleh karena itu, kerjasama untuk menanggulangi masalah ini di Pulau Jawa menjadi sangat penting, dan Jawa Barat menjadi provinsi yang sangat prioritas mengingat besarnya tantangan yang dihadapi dan potensi dampak yang bisa dicapai jika masalah ini berhasil diatasi.

Kerjasama dengan *Nutrition International* di Jawa Barat akan memungkinkan implementasi program gizi yang lebih terstruktur dan berdampak luas, dengan melibatkan berbagai sektor untuk menurunkan angka stunting dan

meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Di Jawa Barat, intervensi gizi tidak hanya berbicara tentang pemberian bantuan langsung, tetapi juga tentang pengembangan kapasitas dan keberlanjutan program, yang lebih banyak mencakup pelatihan dan advokasi. Ini berbeda dengan Banten yang lebih banyak fokus pada distribusi pangan saja, serta Jawa Timur yang meskipun memiliki program *MITRA Youth*, namun terbatas pada remaja putri dan lebih banyak beradaptasi dengan kondisi pandemi (*Nutrition International*, 2024). Pendekatan di Jawa Barat ini, menjadikannya lebih siap untuk melaksanakan intervensi yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pengurangan malnutrisi.

Dengan kondisi tersebut, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang perlu segera ditangani permasalahan malnutrisinya. Meskipun memiliki infrastruktur yang lebih baik dan akses layanan kesehatan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya, angka stunting yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya, baik dari segi akses kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian antar wilayah. Beberapa daerah di Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar terkait kesenjangan sosial-ekonomi, khususnya di daerah-daerah yang lebih terpencil atau miskin. Ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa faktor yang berperan besar dalam memperburuk kondisi gizi anak-anak di provinsi ini (Bappenas, 2020; UNICEF, 2019).

Tingginya angka stunting di Jawa Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, dengan yang paling utama adalah kurangnya akses terhadap makanan bergizi. Asupan protein pada balita di Jawa Barat hanya mencapai 32,7% dari kebutuhan ideal, yang menyebabkan kekurangan gizi pada anak-anak dan

menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak mereka (stunting.go.id, 2021). Keterbatasan akses terhadap makanan bergizi sering kali terkait dengan faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pola makan yang sehat, serta terbatasnya distribusi makanan bergizi di daerah tertentu.

Faktor kedua yang berkontribusi besar adalah praktik pengasuhan yang kurang baik. Beberapa orang tua cenderung memberikan makanan yang tidak sesuai dengan standar gizi, seperti makanan olahan yang kurang bernutrisi, atau tidak memperhatikan jadwal makan yang teratur bagi balita. Selain itu, paparan terhadap teknologi seperti penggunaan ponsel yang berlebihan pada anak-anak juga memengaruhi interaksi orang tua dan anak. Penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat mengurangi waktu interaksi langsung yang seharusnya digunakan untuk memberikan perhatian gizi yang baik kepada anak (stunting.go.id, 2021). Hal ini mengarah pada kurangnya stimulasi dan pengasuhan yang seimbang, yang berperan penting dalam perkembangan anak. Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah terbatasnya akses terhadap air bersih yang layak dan sanitasi yang tidak memadai. Di beberapa wilayah di Jawa Barat, meskipun ada perbaikan, masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki akses penuh terhadap air bersih. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya infeksi yang dapat mengganggu penyerapan gizi, seperti diare dan penyakit infeksi lainnya. Kurangnya sanitasi yang memadai juga berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit yang memperburuk status gizi anak, karena infeksi dapat menghambat proses pertumbuhan dan kesehatan secara keseluruhan (stunting.go.id, 2021).

Masih tingginya angka kasus stunting memiliki dampak yang sangat mendalam, terutama dalam hal pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Kondisi ini memengaruhi seluruh aspek kehidupan mereka, mulai dari kemampuan belajar di sekolah hingga produktivitas mereka di masa dewasa. Stunting yang tidak diatasi dapat berujung pada gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan kognitif anak, yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan kualitas sumber daya manusia (Dewey & Begum, 2011). Lebih lanjut, terdapat masalah gizi buruk dalam bentuk *triple burden malnutrition* yakni kelaparan, obesitas, dan kekurangan konsumsi protein dimana masih menjadi persoalan utama yang harus ditangani secara serius. Ketiga masalah ini sering terjadi secara bersamaan, di mana sebagian besar masyarakat mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi, sementara sebagian lainnya mengalami kelebihan berat badan atau obesitas yang disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang (Popkin, 2012). *Triple burden malnutrition* ini tidak hanya berpotensi memperburuk masalah kesehatan, tetapi juga meningkatkan beban ekonomi akibat biaya pengobatan yang tinggi serta penurunan produktivitas yang disebabkan oleh kondisi kesehatan yang buruk. Jika masalah gizi buruk ini tidak mendapat perhatian yang serius, dampaknya akan terasa tidak hanya pada individu, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Tanpa generasi yang sehat dan berkualitas, kemajuan dalam bidang pendidikan, tenaga kerja, dan sektor-sektor lainnya akan terhambat, yang pada akhirnya menghalangi pembangunan nasional dan global.

Dari penjelasan dampak tersebut mengakibatkan munculnya potensi ancaman krisis kemanusiaan. Ancaman krisis kemanusiaan merujuk pada situasi

dimana manusia mengalami penderitaan yang serius, mengancam kesejahteraan dasar mereka, dan berskala besar. Adapun penyebab utama krisis kemanusiaan, yaitu bencana alam, konflik bersenjata, dan masalah kesehatan maupun keuangan (Ludfiani et al., 2017). Salah satu dimensi krisis kemanusiaan yang kerap diabaikan namun sangat krusial adalah ancaman krisis keamanan kesehatan. Keamanan kesehatan mencakup perlindungan terhadap individu dan komunitas dari penyakit, gangguan kesehatan, serta faktor risiko yang dapat menurunkan kualitas hidup dan merusak sistem kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Stunting dan masalah gizi buruk lainnya, yang merupakan indikasi dari kelemahan dalam sistem kesehatan dan pola pengasuhan, dapat memicu krisis keamanan kesehatan dalam jangka panjang. Dengan tingginya prevalensi gizi buruk, khususnya pada anak-anak, terjadi peningkatan kerentanannya terhadap penyakit infeksi, gangguan kesehatan kronis, dan bahkan kematian yang dapat dihindari. Sebagai contoh, anak yang menderita stunting lebih rentan terhadap infeksi saluran pencernaan, infeksi pernapasan, dan penyakit menular lainnya, yang dapat menyebabkan beban berat pada sistem kesehatan negara (*World Health Organization*, 2018). Selain itu, ketidakseimbangan gizi yang berlangsung lama meningkatkan angka kesakitan dan kematian di kalangan populasi usia produktif, yang pada gilirannya memengaruhi daya saing dan stabilitas ekonomi. Dengan kata lain, stunting tidak hanya berisiko pada kesehatan individu, tetapi juga menciptakan ancaman besar terhadap ketahanan kesehatan masyarakat, yang dapat memperburuk kondisi krisis kemanusiaan yang lebih luas. Hal ini selaras juga dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mengatasi kelaparan

dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Indonesia sendiri masih menduduki peringkat 82 dari 163 negara dalam *Sustainable Development Report* (SDG Index) dengan skor 69,2 karena masalah kelaparan dan ketahanan pangan (*Sustainable Development Report*, 2024). Tingginya presentase gizi buruk pada anak-anak di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pencapaian yang belum optimal dalam hal ini. Untuk mengatasi masalah gizi buruk dan mencegah krisis kemanusiaan yang lebih besar, diperlukan kolaborasi antar sektor pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya seperti NGO (Ludfiani et al., 2017).

Nutrition International hadir untuk membantu mengatasi permasalahan gizi di Jawa Barat dengan melakukan kerjasama erat bersama pemerintah setempat. Sebagai organisasi global yang memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam menangani kesulitan gizi di seluruh dunia, *Nutrition International* berperan aktif dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan gizi buruk di wilayah Provinsi Jawa Barat. *Nutrition International* bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi lain untuk meningkatkan jangkauan dan dampaknya, khususnya adalah perempuan dan anak-anak (*Nutrition International*, 2024). *Nutrition International* merupakan salah satu INGO yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat dalam mengatasi permasalahan malnutrisi atau gizi buruk di wilayah tersebut. *Nutrition International* telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2006 dan telah terlibat dalam pelaksanaan inisiatif kesehatan dan nutrisi untuk masyarakat rentan di Indonesia. *Nutrition International* memiliki visi untuk menciptakan dunia di mana setiap orang, terutama perempuan dan anak-anak, memiliki akses ke nutrisi yang dibutuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Nutrition International mendorong untuk memberikan perhatian dan sumber daya lebih untuk program mikronutrien, serta memberikan pendanaan dan bantuan teknis kepada pemerintah untuk merancang dan melaksanakan program nutrisi, dengan tujuan membuatnya lebih efisien dan terintegrasi dengan sistem kesehatan, serta berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang agar dapat mencapai dan memberikan dampak yang berkelanjutan. Misi yang dilakukan mencakup pendekatan berbasis intervensi gizi berbiaya rendah dengan dampak tinggi, integrasi lintas sektor, inovasi teknologi, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. *Nutrition International* juga berfokus pada kemitraan strategis dengan pemerintah, lembaga donor, dan organisasi lainnya untuk memperluas jangkauan program gizi ke komunitas yang paling membutuhkan di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Program yang dilaksanakan oleh *Nutrition International* membantu mengatasi permasalahan ini dengan program seperti suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri dan ibu hamil, pemberian suplemen vitamin A, dan penanganan diare pada anak dengan menggunakan oralit dan zinc (Lestari, 2022). Hal ini merupakan bagian dari upaya percepatan peningkatan status gizi di Jawa Barat, terutama dalam mengatasi stunting yang menjadi prioritas nasional.

Penelitian ini dilakukan mengingat masih terbatasnya kajian yang membahas kerjasama antara *International Non-Government Organization* (INGO) seperti *Nutrition International* dan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan gizi buruk. *Nutrition International*, sebagai organisasi internasional yang berpengalaman lebih dari 25 tahun, telah memberikan kontribusi signifikan

dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menangani malnutrisi, yang mencakup masalah stunting, wasting, *underweight*, dan *overweight*. Isu-isu gizi buruk ini tidak hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial dan ekonomi negara, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan terhadap kualitas sumber daya manusia. Jika tidak segera ditangani, masalah malnutrisi ini berpotensi berkembang menjadi ancaman krisis keamanan manusia, dimana ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi dapat menyebabkan krisis pangan yang berdampak langsung pada kesehatan dan gizi anak-anak, serta mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan pembangunan suatu negara. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis peran dan efektivitas kerjasama yang dilakukan oleh *Nutrition International* dalam mengatasi permasalahan malnutrisi di Jawa Barat, dengan fokus tidak hanya pada penanggulangan masalah yang terjadi saat ini, tetapi juga pada pembangunan sistem yang berkelanjutan untuk mencegah malnutrisi di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *Nutrition International*, melalui program-programnya, berkontribusi dalam mengatasi ancaman krisis keamanan manusia yang disebabkan oleh malnutrisi di Jawa Barat. Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan konsep kerjasama internasional, yang akan mengkaji peran *Nutrition International* sebagai *catalyst*, *partnership*, dan *implementer* dalam konteks kerjasama antara pemerintah daerah dan organisasi internasional.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana efektivitas kerjasama internasional yang dilakukan oleh *Nutrition International* dalam upaya penyelesaian kasus ancaman keamanan manusia yaitu malnutrisi di daerah Jawa Barat pada tahun 2015-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kerjasama internasional dapat membantu sebuah daerah dalam mengatasi sebuah permasalahan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kerjasama internasional yang dijalin oleh *Nutrition International* dapat membantu Jawa Barat dalam mengatasi krisis keamanan manusia yang disebabkan oleh permasalahan malnutrisi. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah dalam memahami strategi yang diterapkan oleh INGO dalam memecahkan permasalahan di suatu negara, mengingat *Nutrition International* berasal dari Kanada, yang memiliki konteks budaya dan pendekatan yang berbeda dengan budaya Timur di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam bidang ilmu hubungan internasional terutama mengenai isu kesehatan dan krisis keamanan serta dampak yang ditimbulkannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang ingin mengetahui kerjasama yang dapat dilakukan dalam membantu menangani krisis keamanan manusia pada kasus permasalahan malnutrisi di Indonesia dan bagaimana penanganannya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Terdapat beberapa literatur yang membahas mengenai kerjasama internasional oleh *international non-government organization* atau INGO dalam membantu sebuah permasalahan kesehatan dan penyakit yang berkaitan dengan krisis keamanan manusia. Salah satunya yaitu pada penelitian “Peran *Global Fund* dalam Konteks Kemanan Manusia di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Penyakit Tuberkulosis” oleh Pratama dan Bachtiar (2022) dalam *Hasanuddin Journal of International Affairs* yang membahas mengenai peran *Global Fund* dalam mempromosikan keamanan manusia di Sulawesi Selatan, khususnya dalam penanggulangan Tuberkulosis. Penelitian ini juga mengeksplorasi dampak inisiatif kesehatan global terhadap komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori keamanan manusia (*Human Security*) yang digunakan sebagai landasan teoritis yang mengubah fokus dari keamanan tradisional dimana terpusat pada negara menjadi keamanan yang lebih menitikberatkan pada individu. Penelitian ini menekankan perlindungan individu dari berbagai ancaman yang meliputi aspek kejahatan dan martabat dari manusia itu sendiri. Konsep keamanan manusia menyoroti kebebasan individu dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan, serta perlindungan dari gangguan tiba-tiba yang merugikan dalam pola

kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan pendekatan keamanan manusia, penelitian ini dapat menyoroti pentingnya kolaborasi antara *Global Fund* dan organisasi lokal seperti PP 'Aisyiyah dan Yamali dalam menanggulangi Tuberkulosis di Indonesia. *Global Fund* memiliki peran yang signifikan dalam membantu mengakhiri penyakit Tuberkulosis di Sulawesi Selatan dengan beberapa macam program dan investasi. *Global Fund* memastikan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas untuk pengendalian Tuberkulosis di Sulawesi Selatan melalui pendanaan program-program pencegahan, diagnosis, dan pengobatan TB oleh organisasi lokal seperti Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis (YAMALI).

Adapun penelitian berjudul “Kemitraan Indonesia dan *Global Fund* dalam Mengatasi Penyakit Tuberculosis (TBC) di Indonesia” oleh Farahdiba Rachma Bachtiar (2022) dalam jurnal *Review of International Relations* yang membahas mengenai kemitraan antara *Global Fund* (GF) dan Indonesia dalam upaya penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TB) dan HIV. Fokus utama penelitian adalah pada implementasi kemitraan ini dalam konteks kesehatan global, kesehatan keamanan, dan diplomasi kesehatan global. Penelitian juga mencakup analisis terhadap proses, mekanisme, dan efektivitas kerjasama antara *Global Fund*, pemerintah Indonesia, LSM, dan organisasi kemasyarakatan seperti Aisyiyah dalam penanganan penyakit menular sebagai ancaman bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Program *Global Fund* untuk Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual kesehatan keamanan global dan keamanan manusia untuk menganalisis kemitraan antara *Global Fund* dan Indonesia dalam

penanggulangan Tuberkulosis. Ini memungkinkan evaluasi tidak hanya dari segi medis, tetapi juga dari perspektif keamanan global dan keamanan individu, memperluas pandangan holistik terhadap efektivitas kemitraan tersebut. Program tiga tahunan yang didanai oleh kemitraan tersebut memiliki pendekatan terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengumpulan dana dalam siklus tiga tahun, program jangka panjang untuk memerangi penyakit dan memperkuat sistem kesehatan, keterlibatan aktif dari berbagai pihak, serta tinjauan dan evaluasi berkala untuk memastikan pencapaian tujuan. Hal ini merupakan kolaborasi yang erat untuk mencapai hasil optimal dalam penanggulangan Tuberkulosis.

Selanjutnya, terdapat buku *“The Management of Non-Governmental Development Organizations: An Introduction”* pada tahun 2009, oleh David Lewis dan Nazneen Kanji yang menjelaskan peran utama INGO (*International Non-Governmental Organizations*) dalam pembangunan sebagai katalisator, mitra, dan pelaksana. Sebagai katalisator, INGO memicu perubahan sosial dan kebijakan dengan memulai inisiatif baru. Sebagai mitra, mereka bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai pelaksana, INGO mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan di lapangan, memberikan dukungan langsung kepada komunitas untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan. Buku ini menggambarkan bagaimana INGO berkontribusi dalam pembangunan global melalui peran-peran ini meskipun menghadapi tantangan seperti pendanaan dan akuntabilitas.

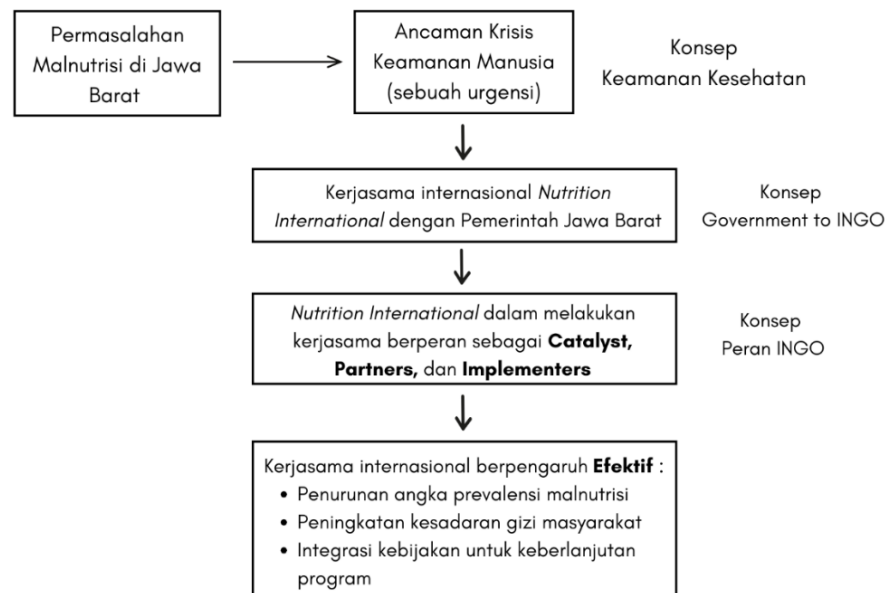
Begitu juga dengan penelitian berjudul *“Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Mengatasi Kemiskinan melalui Kerja Sama Internasional*

Daerah" oleh Sri Issundari dan Yanyan M. Yani (2021) dalam Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan yang membahas pentingnya kerja sama internasional di tingkat daerah untuk mengatasi kemiskinan melalui pembangunan berkelanjutan. Jurnal ini menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta, baik secara nasional maupun internasional, diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). Kerja sama ini membantu daerah memanfaatkan sumber daya global, meningkatkan kapasitas institusi lokal, serta memperoleh pendanaan dan pengetahuan teknis dari negara maju untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Adapun penelitian terakhir yaitu berjudul "*Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*" oleh Rasyid (2018), yang dipublikasikan dalam Jurnal Dinamika Manajemen (Volume 9, Issue 2, hal. 105-116), membahas peran penting NGO dalam kebijakan publik. *Non-Governmental Organization* (NGO) berperan dalam pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, penyuluhan, dan implementasi program di lapangan. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan kebijakan dijalankan dengan baik. Meskipun menghadapi tantangan seperti perbedaan prioritas dan birokrasi, NGO memiliki pengaruh besar dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berdampak positif pada masyarakat.

Dari beberapa literatur di atas membahas mengenai peran dan kerjasama organisasi internasional bersama dengan pemerintah Indonesia maupun organisasi lokal yang berusaha menangani dan mengatasi beberapa penyakit seperti

Tuberkulosis dan Stunting dengan konsep dan pendekatan *human security* serta kerjasama organisasi internasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada organisasi internasional yang diteliti juga dengan konsep digunakan. Penelitian terdahulu membahas dari perspektif salah satu organisasi internasional seperti *Global Fund* (khusus masalah tuberkulosis). Akan tetapi, belum ada penelitian yang membahas mengenai organisasi internasional *Nutrition International* tidak seperti penelitian lain yang cukup sering membahas mengenai organisasi internasional lainnya. Penelitian terdahulu hanya membahas antara salah satu dari perannya saja atau melihat dari perspektif *human security*-nya saja. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam kerjasama organisasi internasional yang melihat dari konsep kerjasama internasional dan konsep organisasi internasional dengan menggunakan pendekatan *human security* dalam menangani sebuah penyakit yang berpotensi menjadi ancaman keamanan manusia yaitu malnutrisi. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada organisasi internasional kerjasama internasional *Nutrition International*.



Gambar 1. 1 Alur Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Dalam pemecahan masalah malnutrisi di Jawa Barat, dapat dilakukan kerjasama internasional antara *Nutrition International* (NI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Masalah malnutrisi di daerah ini dipandang sebagai ancaman krisis keamanan manusia, yang berhubungan dengan konsep keamanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, konsep kerjasama *Government to INGO* diterapkan, di mana Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak pemerintah bekerja sama dengan INGO yaitu *Nutrition International*. Dalam peranannya, *Nutrition International* bertindak sebagai katalisator, mitra, dan pelaksana, yang memungkinkan terjadinya perubahan positif dalam penanganan masalah malnutrisi. Hasil dari kerjasama internasional ini terbukti efektif, antara lain dengan penurunan prevalensi malnutrisi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi, serta integrasi kebijakan untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

1.5.1 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dapat terwujud dengan adanya peran organisasi internasional yang membantu negara-negara dalam mengatasi perbedaan kepentingan dan membangun kepercayaan. Konsep kerjasama internasional menjelaskan bagaimana institusi ini berperan dalam menciptakan stabilitas, mengurangi ketidakpastian, dan memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan bersama. Menurut Robert O. Keohane (1984), konsep kerjasama internasional merupakan sebuah upaya bagaimana negara-negara dapat mempertahankan kerjasama yang berkelanjutan bahkan dalam kondisi anarki internasional dan tanpa adanya kekuatan hegemonik yang mendominasi dan memaksakan aturan. Keohane (1984) menyoroti peran penting lembaga dan rezim internasional sebagai mekanisme yang memfasilitasi kerjasama dengan secara positif dalam mengurangi biaya transaksi yang terkait dengan negosiasi dan implementasi perjanjian, menyediakan informasi yang relevan dan transparan untuk mengurangi ketidakpastian, serta menciptakan ekspektasi yang stabil mengenai perilaku negara-negara lain. Melalui fungsi-fungsi ini, lembaga dan rezim internasional memungkinkan negara-negara untuk mengatasi hambatan yang sering kali muncul dalam mencapai tujuan bersama (Keohane, 1984, 5-12).

Bentuk kerjasama internasional dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe, antara lain *Government to Government (G to G)*, yaitu kerja sama langsung antar pemerintah negara yang sering berbentuk

perjanjian bilateral atau multilateral dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan (Baylis et al., 2017). Selanjutnya, *Government to International Non-Governmental Organization (G to INGO)* menggambarkan kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintah internasional dalam pelaksanaan program pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan advokasi kebijakan (Keck & Sikkink, 1998; Nye, 2008). Terakhir, *Government to People (G to People)* merupakan bentuk kerjasama yang menekankan interaksi langsung antara pemerintah dengan masyarakat sipil atau warga negara untuk mendorong partisipasi publik dalam pembangunan dan pengambilan keputusan (Fung, 2006; Mansuri & Rao, 2013).

1.5.2 Human Security

Dahulu, konsep keamanan hanya berfokus pada aspek militer, konflik, dan pertahanan teritorial, dengan keamanan didefinisikan sebagai sebuah situasi ketiadaan dari adanya perang dan ancaman dari negara lain. Akan tetapi setelah Perang Dingin, pandangan ini telah berubah. Keamanan kini mencakup isu-isu kemanusiaan seperti perdagangan manusia, pemanasan global, kelaparan, terorisme, kemiskinan, dan penyebaran penyakit, yang dikenal sebagai keamanan manusia (*human security*). Keamanan tidak lagi hanya berarti ketiadaan konflik dan ancaman, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, tempat tinggal, rasa aman, dan kesehatan. Pergeseran ini dari keamanan nasional menuju keamanan manusia

menunjukkan peningkatan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan keamanan manusia sebagai perlindungan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi, serta dari gangguan mendadak yang mengganggu kehidupan sehari-hari. *Commission on Human Security* menggambarkan sebagai keselamatan individu dari ancaman kekerasan dan non-kekerasan, menciptakan kondisi bebas dari ancaman yang membahayakan hak, keselamatan, atau kehidupan mereka. Ancaman terhadap manusia terbagi dalam dua kategori utama: pertama, perlindungan dari bahaya kronis seperti kelaparan, malnutrisi, penyakit, dan represi; kedua, perlindungan dari gangguan tak terduga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, tempat kerja, atau komunitas (UNDP, 1994, 24-25).

Keamanan manusia, seperti yang dikonseptualisasikan oleh *Commission on Human Security*, mengubah pemahaman tentang keamanan dari fokus militer yang berpusat pada negara menjadi pendekatan holistik yang berpusat pada kesejahteraan individu. Konsep ini bertujuan melindungi kebebasan dasar dan aspek kehidupan penting bagi pemenuhan manusia. Keamanan manusia menangani berbagai ancaman seperti kemiskinan, kekerasan, degradasi lingkungan, krisis kesehatan, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan menekankan perlindungan terhadap individu dari tantangan besar dan meluas, konsep

ini menciptakan kondisi di mana orang dapat hidup tanpa rasa takut atau kekurangan. Keamanan manusia menekankan pemberdayaan individu dan komunitas untuk membangun ketahanan, mengatasi akar penyebab ketidakamanan, dan mempromosikan solusi berkelanjutan. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman komprehensif tentang keamanan, pembangunan, dan hak asasi manusia (*United Nations Trust Fund for Human Security*, 2009).

1.5.3 International Non-Governmental Organization (INGO)

International Non-Governmental Organizations (INGOs) adalah organisasi independen, non-partisan, dan non-profit yang beroperasi di tingkat internasional. Mereka biasanya didirikan oleh individu atau kelompok dari berbagai negara untuk menangani isu-isu global seperti hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. INGOs bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas dengan melakukan berbagai kegiatan seperti advokasi, pemberian bantuan, program pembangunan, dan lainnya (Lewis & Kanji, 2009).

INGOs berperan sebagai penghubung antara masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga internasional dalam menangani masalah-masalah kompleks yang memerlukan kerjasama lintas negara. Mereka juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan nasional dan internasional serta meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu penting. Dengan fokus pada tujuan bersama dan kepentingan umum, INGOs menjadi salah

satu kekuatan progresif dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat global (Lewis & Kanji, 2009).

1.6 Operasional Konsep

1.6.1. Kerjasama *Government to INGO*

Kerjasama *Government to International Non-Governmental Organization* (G to INGO) merupakan suatu bentuk kemitraan strategis antara pemerintah negara dengan organisasi non-pemerintah internasional yang memiliki mandat dan kapasitas untuk menangani isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia, serta perubahan iklim. Bentuk kerjasama ini sangat penting mengingat peran INGO yang seringkali lebih fleksibel dan responsif dalam menjangkau kelompok masyarakat rentan serta pelaksanaan program di lapangan (Keck & Sikkink, 1998). INGO juga mampu mengisi celah yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh pemerintah karena keterbatasan sumber daya atau birokrasi, sehingga kolaborasi ini memungkinkan penyelenggaraan program yang lebih efektif dan inklusif.

Nye (2008) menyoroti bahwa dalam konteks diplomasi publik, *G to INGO* membantu pemerintah memperkuat soft power, yakni kemampuan untuk mempengaruhi aktor lain tanpa menggunakan paksaan, melalui jaringan dan legitimasi yang dimiliki INGO. *Kerjasama G to INGO* dapat berbentuk pendanaan program, pelaksanaan proyek bersama, advokasi kebijakan, serta pertukaran informasi dan sumber daya yang saling

menguntungkan. Selain itu, model kerjasama ini mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang merupakan elemen penting dalam governance modern. Hal ini menjadi jembatan bagi pemerintah untuk menjalin komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat global melalui INGO sebagai perantara (Keck & Sikkink, 1998).

Dalam penelitian ini, Kerjasama *Government to INGO* berfungsi sebagai pendekatan untuk menganalisis bagaimana *Nutrition International* sebagai *international non-governmental organization* melakukan kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat sebagai government dalam menangani permasalahan malnutrisi di Jawa Barat. Dalam kerangka *Government to INGO*, hubungan ini mencerminkan sinergi antara otoritas pemerintah yang memiliki legitimasi dan kewenangan regulasi dengan INGO yang membawa inovasi, sumber daya, dan jaringan global. Hal ini selaras dengan pemikiran Keck dan Sikkink (1998) bahwa INGO berfungsi sebagai aktor kunci yang mengisi celah operasional dan memperkuat efektivitas program pembangunan melalui kemitraan lintas sektor. Selain itu, kolaborasi ini memperkuat *soft power* pemerintah daerah dalam menghadapi krisis keamanan manusia dengan memanfaatkan keahlian dan legitimasi global *Nutrition International* (Nye, 2008). Indikator untuk menilai pelaksanaan kerjasama ini dapat diukur melalui sejumlah aspek, antara lain sektor yang terlibat dalam kolaborasi dengan *Nutrition International*, jenis pelatihan yang

dilaksanakan, serta kebijakan atau komitmen yang dihasilkan sebagai hasil dari kerjasama tersebut.

1.6.2 *Human Security*

Konsep keamanan manusia, yang diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1994, berfokus pada pemahaman dasar manusia akan keamanan. Keamanan tidak hanya berarti perlindungan dari ancaman fisik seperti kejahatan dan penindasan, tetapi juga mencakup perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba dan merugikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, pekerjaan, komunitas, maupun lingkungan (Hata & Wijayanti, 2022).

Kategori keamanan manusia yang didefinisikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) mencakup aspek-aspek penting yang beragam untuk melindungi individu dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Adapun aspek tersebut adalah keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, dan keamanan politik.

Penelitian ini fokus pada keamanan manusia yang mengancam pada keamanan kesehatan. Keamanan kesehatan ini sudah masuk pada level masyarakat global yang didefinisikan sebagai kegiatan yang diperlukan, untuk meminimalkan bahaya dan dampak dari kejadian kesehatan masyarakat akut yang membahayakan kesehatan orang di berbagai

wilayah geografis dan batas internasional. Konsep keamanan kesehatan merupakan bagian penting dari keamanan manusia yang berkaitan dengan upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan. Keamanan kesehatan tidak hanya mencakup aspek kesehatan individu, tetapi juga melibatkan upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan baik di tingkat nasional maupun global. Konsep keamanan kesehatan mencakup kegiatan proaktif dan reaktif yang bertujuan untuk meminimalkan bahaya dan dampak dari peristiwa yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah geografis dan batas-batas internasional (WHO,2007). Adapun proses pembingkaihan isu dikonsepsikan dengan mengaitkan aspek dari keamanan kesehatan yang terancam akibat dampak dari banyaknya malnutrisi di daerah Jawa Barat, yaitu aspek dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan melalui pendekatan preventif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dengan cara yang lebih proaktif, seperti penyuluhan gizi, suplementasi mikronutrien, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengubah pola makan yang lebih sehat. Dalam hal ini, *Nutrition International* dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama untuk menciptakan program-program yang menargetkan kelompok yang paling rentan terhadap malnutrisi, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan remaja.

1.6.3 Peran INGO

International Non-Governmental Organization (INGO) adalah organisasi non-profit yang beroperasi di tingkat internasional dan tidak berafiliasi dengan pemerintah negara manapun. INGO biasanya didirikan untuk mengatasi masalah global atau lintas batas yang memerlukan kerja sama lintas negara. INGO sering bekerja dalam kerangka kerja global dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Mereka juga dapat berperan sebagai penghubung antara negara-negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam mempromosikan kerja sama global dan penyelesaian masalah bersama (Lewis & Kanji, 2009).

Menurut David Lewis dan Nazneen Kanji, untuk menganalisis peran suatu INGO, dapat dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh INGO tersebut. Dalam buku mereka yang berjudul "*Non-Governmental Organizations and Development*", mereka menyatakan bahwa INGO memiliki tiga kegiatan utama yang dapat didefinisikan sebagai tiga peran: implementer, katalis, dan mitra. INGO bisa menjalankan salah satu peran saja atau ketiganya sekaligus (Lewis & Kanji, 2009).

Dalam penelitian ini, *Nutrition International* berperan sebagai katalis untuk mendukung keamanan manusia khususnya dari keamanan kesehatan. *Nutrition International* dapat memainkan peran penting dalam memobilisasi masyarakat, pemerintah, dan pemangku

kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman keamanan kesehatan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Mereka dapat mengorganisir kampanye penyuluhan, pelatihan, dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil.

Dengan berperan sebagai katalis, *Nutrition International* dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya mengatasi ancaman keamanan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi antara *Nutrition International* sebagai INGO, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam memastikan respons yang efektif terhadap masalah kesehatan yang kompleks (Lewis & Kanji, 2009).

Nutrition International (NI) berperan sebagai mitra strategis yang mengintegrasikan berbagai sektor dalam sebuah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak terkait. Sebagai sebuah organisasi internasional non-pemerintah (INGO), *Nutrition International* tidak hanya membawa keahlian teknis, tetapi juga jaringan global dan kapasitas untuk menyusun program-program yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran *Nutrition International* sebagai mitra strategis tercermin dalam kemampuannya untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga pendidikan dan fasilitas kesehatan. Sebagai bagian dari kerjasama ini, *Nutrition International* bekerja sama dengan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan dalam merancang dan melaksanakan program-program yang menasar isu-isu gizi masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting, wasting, dan anemia. Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian suplementasi mikronutrien, tetapi juga pada edukasi gizi yang lebih luas kepada masyarakat, dengan penekanan pada pencegahan jangka panjang.

Sebagai *Implementers*, *Nutrition International* berperan sebagai penyedia jasa yang fokus pada pendampingan teknis dan pelaksanaan program di lapangan. *Nutrition International* tidak terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya atau kebijakan tingkat makro, melainkan lebih pada aspek teknis operasional, yaitu mendampingi pemerintah dalam melaksanakan program-program gizi yang telah disepakati. Peran utama *Nutrition International* adalah memberikan dukungan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan program gizi, seperti suplementasi mikronutrien, penyuluhan gizi, dan pelatihan kepada tenaga medis serta tenaga pendidik. *Nutrition International* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan standar teknis yang sudah ditetapkan, memberikan pelatihan kepada para petugas di puskesmas dan sekolah-sekolah, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di lapangan.

1.7 Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berargumen bahwa kerjasama internasional yang dilakukan oleh *Nutrition International* sebagai salah satu *International Non-Governmental Organization* dalam membantu upaya menangani ancaman krisis

keamanan manusia yaitu kasus malnutrisi di Jawa Barat, Indonesia tahun 2015-2023 adalah efektif. Dengan melakukan kerjasama internasional melalui pendampingan program bersama pemerintah dimana berperan sebagai *catalyst*, *partners*, dan *implementers*, peran organisasi internasional seperti *Nutrition International* membawa dampak positif bagi urgensi penanganan permasalahan ancaman keamanan manusia yaitu mengurangi prevalensi malnutrisi yang ada di Jawa Barat.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan sebuah pendekatan induktif, interpretatif, dan naturalistik, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiahnya (Abdussamad, 2021). Ciri-cirinya meliputi pengumpulan data kualitatif, analisis induktif, fokus pada makna dan konteks, peran aktif peneliti, dan fleksibilitas desain (Sugiyono, 2015). Metode ini cocok digunakan untuk menjelajahi fenomena baru, memahami pengalaman orang, mempelajari situasi sosial kompleks, dan mengevaluasi program atau kebijakan serta memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial. Pada konteks penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk memahami kerjasama yang dilakukan oleh Nutrition International apakah sesuai dengan konsep INGO dengan pendekatan studi keamanan manusia. Dengan metode ini, penelitian dapat terfokuskan pada pemahaman makna dan peran aktor yang terlibat untuk menangani studi kasus penelitian ini. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memberikan penjelasan yang jelas dalam melihat peran aktor ketika memberikan kontribusi dan melakukan kerjasama.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai suatu permasalahan dan penanganannya. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan ringkasan yang sistematis dan objektif terhadap suatu fenomena, situasi, atau karakteristik tertentu (Sugiyono, 2015). Fokus utamanya adalah pada deskripsi detail tanpa tujuan untuk menguji hipotesis atau menetapkan hubungan sebab-akibat, melainkan untuk menyajikan pemahaman yang jelas dan akurat tentang fenomena yang diteliti.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian, baik fisik maupun virtual, adalah tempat di mana peneliti mengumpulkan data untuk penelitian mereka (Creswell, 2013). Ini dapat berupa tempat-tempat seperti hutan, sekolah, rumah sakit, atau komunitas, atau dapat berupa ruang online seperti situs web atau forum (Merriam, 2009). Lokasi penelitian ini adalah di Provinsi Jawa Barat dan melalui situs web.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti dalam suatu penelitian (Creswell, 2013). Subjek tersebut dapat mencakup individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau bahkan benda mati (Merriam, 2009). Pemilihan subjek penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian menghasilkan data yang valid dan reliabel. Penulis akan

mengambil subjek organisasi internasional *Nutrition International* dan Provinsi Jawa Barat, Indonesia untuk diteliti lebih lanjut. Subjek tersebut mencakup *Nutrition International* yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mengatasi ancaman krisis keamanan manusia yaitu permasalahan malnutrisi.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang menggunakan kata-kata, gambar, atau video untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini akan memuat data yang bersumber dari situs web resmi *Nutrition International* dan kajian-kajiannya yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut, serta penelitian yang terdahulu.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data merupakan elemen penting dalam penelitian yang menyediakan informasi dan bahan baku untuk dianalisis. Sumber data pada penelitian dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder. Data dalam penelitian ini akan bersumber dari data yang berasal dari buku, jurnal, artikel, berita, pernyataan tertulis, ataupun dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan penelitian penulis.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan bahan baku untuk penelitian mereka.

(Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menghimpun informasi yang tidak bersifat numerik, melainkan berupa deskripsi, narasi, dan interpretasi. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur untuk menjawab permasalahan penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam pengelolaan data pada penelitian ini, akan diterapkan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman (Miles et al., 1994). untuk menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap masalah penelitian. Langkah pertama melibatkan pengumpulan data yang relevan. Selanjutnya, data akan direduksi untuk memudahkan penulis dalam memilih data, fakta, dan variabel yang sesuai dengan tema penelitian. Selain itu, data akan dikategorikan dan dianalisis untuk mencari pola hubungan dari fenomena yang ada. Setelah pola dan hubungan tersebut teridentifikasi, penarikan kesimpulan dilakukan untuk membantu penulis menjawab permasalahan penelitian dengan menyajikan data dalam bentuk deskriptif.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini terjamin kredibilitas dan validitasnya. Data tersebut akan diperoleh langsung dari situs resmi dan jejaring Nutrition International. Selain itu, penulis akan memastikan bahwa data dalam penelitian ini berasal dari sumber yang terpercaya dengan mencantumkan referensi dalam daftar pustaka.